



Demokratisasi Negara Sudan Pasca Berakhirnya Pemerintahan Islam

Faradylla Ayu Laqzmitha^{1*} & Gonda Yumitro²

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Submitted : 9 March 2023 Revision : 6 July 2023 Accepted : 23 July 2023

Abstract

This article discusses the political conditions, and the process of democratization in Sudan after the end of Islamic rule. As a predominantly Muslim country, Sudan has long had an Islamic government and sharia-based laws. However, after President Omar Bashir stepped down, in 2020 the Sudanese transitional government decided to end the system of government under Islamic law and promised freedom or democracy for the people of Sudan. This is then interesting to discuss and this article aims to find out the condition of Sudan after the end of Islamic rule, and to analyze whether the process of democratization by the transitional government of Sudan was successful. The author uses a descriptive method, with a democracy and democratization approach. Data is collected through Google Scholar, the Freedom House Website, and several other sources. then the data is analyzed by comparing the index of freedom in the State of Sudan in 2022 with 2019 after the revolution or the end of the authoritarian government of President Omar Bashir. The author finds that the process of democratization in Sudan after the end of the Islamic government or Bashir's authoritarian government has not been successful. Sudan has indeed experienced several democratization processes, but democracy in Sudan has not yet been consolidated. This is due to a number of reasons, such as the coup d'etat and the domination of the Sudanese military, the transitional government that is not transparent, people's rights that have not been fulfilled, and there is still a very severe economic crisis.

Keywords: *Coup d'etat, Democracy, Islamic Government, Sudan, Sudan Crisis*

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai kondisi politik, dan proses demokratisasi di Sudan setelah berakhirnya pemerintahan Islam. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Sudan telah lama menerapkan pemerintahan Islam dan hukum yang didasarkan kepada syariah. Namun, setelah Presiden Omar Bashir lengser, pada tahun 2020 pemerintah transisi Sudan memutuskan untuk mengakhiri sistem pemerintahan di bawah hukum Islam dan menjanjikan kebebasan atau demokrasi untuk masyarakat Sudan. Hal ini kemudian menarik untuk dibahas dan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Sudan pasca berakhirnya pemerintahan Islam, serta menganalisis apakah proses demokratisasi oleh pemerintah transisi Sudan berhasil. Penulis menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan demokrasi dan demokratisasi. Data dikumpulkan melalui *Google Scholar*, *Website Freedom House*, dan beberapa sumber lain. kemudian data di analisis dengan membandingkan index kebebasan di Negara Sudan pada tahun 2022 dengan tahun 2019 setelah terjadinya revolusi atau berakhirnya pemerintahan otoriter presiden Omar Bashir. Penulis menemukan bahwa proses demokratisasi di Sudan pasca berakhirnya pemerintahan Islam atau Pemerintahan otoriter Bashir belum berhasil. Sudan memang sudah mengalami beberapa proses demokratisasi, namun demokrasi di Sudan belum dapat terkonsolidasi. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, seperti terdapat kudeta kembali dan dominasi dari pihak militer Sudan, pemerintah transisi yang tidak transparan, hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi, dan masih terdapat krisis ekonomi yang sangat parah.

Kata Kunci: *Demokrasi, Krisis Sudan, Kudeta, Pemerintahan Islam, Sudan*

How to Cite: Laqzmitha, F. A. & Yumitro, G. (2023). Demokratisasi Negara Sudan Pasca Berakhirnya Pemerintahan Islam *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol 15 (2): 212 - 228.

*Corresponding author: Faradylla Ayu Laqzmitha

E-mail: faradyllaal2@gmail.com

PENDAHULUAN

Sudan merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam di Afrika, yang memiliki kekayaan alam sangat besar. Sebelum terpecah dan mengalami krisis ekonomi Sudan merupakan negara yang luas, dan sangat strategis secara geopolitik. Kebijakan Sudan terutama setelah Omar Bashir memimpin yang didukung oleh kelompok Islamis membuat Sudan berkonflik dengan Amerika. Sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika membuat Sudan kesulitan dalam hal ekonomi dan berakhir dengan gejolak politik. Konflik antara wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan juga dapat dibidang menjadi salah satu faktor dari krisis politik di negara ini. Sudan Selatan memiliki penduduk mayoritas beragama Kristen, sedangkan Sudan Utara di dominasi oleh penduduk muslim (Machmudi, 2021). Konflik antara dua wilayah bermula karena adanya perasaan tidak adil oleh pihak selatan dikarenakan, sumber daya alam banyak dikembangkan di wilayah Sudan Utara. Perselisihan

antara Kelompok Sosialis dan Islamis inilah yang mengakibatkan awal ketidakstabilan politik di Sudan (Machmudi, 2021).

Berbagai permasalahan sosial dan ekonomi selama bertahun-tahun yang terjadi di Sudan akhirnya memicu demonstrasi masyarakat pada tanggal 19 Desember 2018, puncaknya adalah ketika Sudan mengalami kenaikan harga makanan, berakhirnya subsidi untuk gandum dan bahan bakar. Protes ini merupakan bentuk kemarahan selama bertahun-tahun atas korupsi dan penindasan yang terjadi. Puluhan orang telah tewas dalam kekerasan terkait protes tersebut, sejak dimulainya demonstrasi pro-demokrasi (Wahiduddin, 2020).

Upaya pemerintah untuk menekan protes hanya meningkatkan kemarahan yang membawa lebih banyak orang ke jalan. Pada pertengahan Januari 2019, pemberontakan berubah menjadi revolusi nasional melawan pemerintahan Presiden Omar Bashir. Kemudian pada 22 Februari 2019, Presiden Bashir menyatakan keadaan

darurat dan bahkan menggunakan hukum Islam untuk mencoba dan meredam dorongan revolusioner dengan bersikeras bahwa perempuan yang memprotes menunjukkan perilaku tidak Islami dan jika ketahuan akan diberikan dihukum cambuk (Arab, 2019).

Selain itu, pihak militer juga mulai mengalihkan dukungan mereka dari Bashir kepada para pengunjuk rasa. Tanpa dukungan militer ini, posisi Bashir menjadi tidak dapat dipertahankan dan dia terpaksa mundur pada 11 April 2019. Masyarakat Sudan mampu mengubah resolusi 2019 ini menjadi sebuah transisi demokrasi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu gerakan protes yang sangat terorganisir dan terpadu, rezim yang terbagi antara militer dan paramiliter, dan front internasional bersatu yang mendorong militer untuk bernegosiasi (Grewal, 2021).

Menyusul jatuhnya pemerintahan Bashir ini, sekelompok perwira militer membentuk Dewan Militer Transisi (TMC) di bawah kepemimpinan Ahmed Awad Ibn Auf, yang digantikan oleh Abdel

Fattah al-Burhan sehari setelah kudeta. Setelah Presiden Omar Bashir lengser, ternyata pemerintahan transisi militer atau TMC, tidak ingin sepenuhnya menyerahkan kekuasaan ke pemerintah sipil. Langkah ini menimbulkan perlawanan keras dari rakyat Sudan yang dipimpin oleh *Force of Freedom and Change* (FFC), untuk pembagian kekuasaan. TMC merespons dengan keras, protes dari beberapa kalangan masyarakat ini, setidaknya 101 orang tewas dan 326 terluka dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan Sudan di Khartoum pada tanggal 3 Juni (Yuhas, 2019).

Hal ini menimbulkan banyak kecaman dari pihak internasional, seperti Uni Afrika yang bersikap tegas dengan menyatakan akan mencabut keanggotaan Sudan, apabila pihak militer Sudan tidak mau menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintahan transisi yang dipegang oleh pihak sipil. Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 2019 dilakukanlah mediasi yang menghasilkan kesepakatan adanya pemerintahan transisi gabungan dari militer dan sipil, dan pada tanggal 21 Agustus

2019 dilantik Jenderal Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, sebagai presiden dari pemerintah transisi gabungan tersebut (Machmudi, 2021).

Setelah perjanjian pembagian kekuasaan langkah-langkah demokratisasi mulai diupayakan seperti persiapan menuju pemilihan umum. Kabinet baru juga mulai dibentuk dan beroperasi pada 8 September 2019, dengan Abdalla Hamdok sebagai perdana menteri.

Pada tahun 2020 pemerintah transisi Sudan telah memutuskan untuk mengakhiri sistem pemerintahan di bawah hukum Islam. Pemerintah juga menyatakan bahwa Sudan tidak akan menetapkan agama resmi, sehingga tidak akan ada warga yang mengalami diskriminasi berdasarkan agama. Pemerintah mengatakan negara Sudan akan mengarah untuk menjadi sebuah negara demokratis dimana hak-hak warga negara akan diutamakan, dan konstitusi negara Sudan akan didasarkan kepada prinsip pemisahan agama dan negara. Pemerintah Sudan juga menghilangkan beberapa hukum Islam yang kontroversial, seperti

berkaitan dengan alkohol, dan pakaian wanita, kebebasan untuk memilih agama, dan lain-lain. Perdana Menteri Sudan, Abdullah Hamdok, menyatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut merupakan langkah penting menuju reformasi seluruh sistem hukum di Sudan untuk mencapai perdamaian, keadilan dan kebebasan melalui undang-undang, serta lembaga hukum yang memberikan supremasi hukum (Amin, 2020).

Terdapat beberapa reaksi dari warga Sudan terkait kebijakan pemerintah transisi Sudan, ada yang menyambut baik langkah pemerintah ini, karena hal ini dianggap dapat menghilangkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap beberapa golongan. Seperti sebelumnya praktik hukum tradisional dan ketentuan tertentu dalam yurisprudensi Islam, yang terus mendiskriminasi perempuan dan kaum minoritas. Data dari Afrobarometer, yang dikumpulkan pada bulan Juli dan Agustus 2018, memberikan gambaran yang positif dimana masyarakat Sudan sangat mendukung demokrasi

dan supremasi hukum, sebanyak 62% lebih menyukai demokrasi daripada bentuk pemerintahan lainnya (*BTI Transformation Index*, 2022). Hal ini kemudian menarik untuk diteliti apakah pemerintah transisi ini berhasil mewujudkan sistem demokrasi dan bagaimana perkembangan demokrasi di Sudan pasca berakhirnya pemerintahan Islam dan dictator.

Untuk mempertegas kebaruan mengenai penelitian ini penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu. Pertama penelitian berjudul Implementasi Demokratisasi Sudan: Kasus Runtuhnya Rezim Pemerintahan Omar Bashir oleh Aucky Adi Kurniawan dan Syaprin Zahidi. Dalam penelitian ini dibahas bahwa jatuhnya rezim Omar Bashir merupakan proses demokratisasi yang terjadi di Sudan dan bagaimana masyarakat Sudan memiliki peran dalam penyelesaian konflik dan menjunjung nilai demokrasi di Sudan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi demokratisasi di Sudan dapat dilihat dengan tingginya partisipasi gerakan massa di Sudan dalam perlawanan terhadap

pemerintahan otoriter Presiden Omar Bashir. Melalui penelitian ini kita dapat mengetahui ketika civil society telah menyadari pentingnya rasa keadilan, aman, dan kepercayaan terhadap pemerintah di sebuah negara, maka dengan sendirinya demokrasi akan terwujud (Kurniawan & Zahidi, 2022).

Penelitian kedua berjudul Oligarki dan Tertundanya Pemilu 2022 di Sudan Pasca Lengsernya Presiden Bashir, oleh M. Hasan Izzurahman dan M. Hamdan Basyar. Pada penelitian ini dibahas mengenai tertundanya pemilu nasional di Sudan yang awalnya sudah ditetapkan melalui konstitusi sementara. Dalam penelitian digunakan metode kualitatif dan teori oligarki. Melalui penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa masa depan demokrasi di Sudan tidak dapat dilepaskan dari peran jaringan elit dan oligarki pada rezim Bashir. Dalam elit militer juga muncul nama-nama yang sangat berpengaruh dimana memiliki jaringan dan kuasa penuh atas semua sumber daya dan sektor penting di Sudan (Izzurahman & Basyar, 2022).

Perbedaan penelitian ini adanya hubungan antara satu gejala dengan penelitian sebelumnya, yaitu dan gejala lain dalam masyarakat terletak pada fokus penelitian. (Koentjaraningrat, 1993).

Penelitian sebelumnya berfokus Melalui metode deskriptif, kepada civil society di Sudan dalam peneliti akan memberikan penjelasan menciptakan dan mendukung nilai dan uraian sistematis yang mengalir nilai demokrasi, dan penelitian kedua melalui paragraf hingga tiba pada berfokus kepada maraknya oligarki di konklusi penelitian. Dalam metode Sudan dan tertundanya pemilu deskriptif ini dapat menggunakan Sudan. Penelitian terbaru ini akan sejumlah alat seperti, gambar, grafik, berfokus dalam membahas transisi bagan, dan tabel untuk mempertegas demokrasi sudan pasca berakhirnya situasi atau kondisi tertentu (Zaluchu, pemerintahan Islam dan diktator, 2021), seperti yang penulis gunakan serta hambatan terciptanya demokrasi gambar perentase dari laporan freedom tersebut. Maka dari itu penulis house. Metode ini juga membantu memiliki tujuan untuk mengetahui penulis dalam menjelaskan dan bagaimana perkembangan demokrasi mendeskripsikan mengenai proses di negara Sudan. perkembangan atau transisi demokrasi di negara Sudan pasca berakhirnya pemerintahan Islam dan pemerintahan diktator.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang nantinya akan membantu penulis untuk menjelaskan kondisi atau fenomena yang ada, seperti proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi. Menurut Mely G. Tan penelitian yang bersifat deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tepat terhadap sifat-sifat individu, keadaan, atau frekuensi Data penelitian penulis kumpulkan menggunakan metode studi pustaka. Di dalam metode ini, peneliti mengumpulkan teori dan informasi dari dokumen kepustakaan yang menyangkut topik mengenai kondisi politik dan transisi atau perkembangan demokrasi di negara Sudan. Sumber-sumber tersebut seperti

buku, jurnal, laporan penelitian, digunakan untuk mendeskripsikan ensiklopedia, berita kredibel berbasis permasalahan, menjawab rumusan online. Dalam penelitian ini penulis masalah yang ada, dan kemudian juga mengumpulkan materi atau data ditarik kesimpulan.

dikumpulkan melalui *Google Scholar*, Dalam membahas mengenai dengan berbagai kata kunci, seperti perkembangan demokrasi di Sudan ini penulis juga menggunakan konsep *Democracy Sudan*, *political Sudan*, *Sudan post Bashir*, dan *Sudan transition*. demokratisasi. Demokratisasi

Dengan batasan waktu jurnal atau merupakan proses panjang yang terdiri artikel antara tahun 2018 hingga 2022. dari beberapa tahapan untuk

Kemudian penulis juga tercapainya sistem demokrasi di suatu mengumpulkan data melalui website negara. Samuel Huntington Freedom World terkait indeks dan mendefinisikan demokratisasi, sebagai variabel demokrasi atau kebebasan di sekelompok transisi dari rezim non-negara Sudan. Freedom World adalah demokratis ke demokrasi yang terjadi laporan global tahunan tentang hak- dalam periode waktu tertentu. hak politik dan kebebasan sipil, yang (Diamond, 1997)

terdiri dari peringkat numerik dan teks **HASIL DAN PEMBAHASAN**

deskriptif untuk setiap negara. (House, Pada tahun 2019, Sudan menyaksikan berakhirnya 30 tahun

Variabel penilaian yang rezim Islam otoriter setelah berbulan-digunakan oleh Freedom House terdiri bulan pemberontakan rakyat yang dari hak politik dan kebebasan sipil. menyebar ke berbagai wilayah negara. Skor yang diusulkan para analis akan Setelah berbulan-bulan negosiasi dibahas dalam serangkaian pertemuan intensif, kesepakatan pembagian tinjauan. Data dari Freedom House kekuasaan dicapai antara militer dan kemudian di analisis dengan sipil yang membawa pemerintahan membandingkan indeks kebebasan transisi berkuasa pada September 2019. pada tahun 2022 dengan tahun 2018 Agenda utama pemerintah sebelum revolusi terjadi. Data lain yang transisi adalah untuk memimpin telah diperoleh juga dipilah kemudian negara menuju transformasi demokrasi

melalui pemilu yang akan diadakan afiliasi gender, agama, budaya atau pada akhir masa transisi. Setelah etnis (*BTI Transformation Index*, 2022). lengsernya pemerintahan Omar Bashir Perjanjian ini membahas mengenai tentunya menjadi kesempatan bagi pasal-pasal tentang diskriminasi di negara Sudan untuk melakukan daerah-daerah yang mengalami perang perubahan serta menghadirkan negara saudara dan marginalisasi, seperti yang inklusif dan demokratis. wilayah *Darfur, Nil Biru, dan Kordofan*

Selama masa transisi ini *Selatan*. Melalui Perjanjian Perdamaian terdapat beberapa pencapaian positif Juba pemerintah transisi berjanji untuk dari pemerintah transisi, seperti menciptakan negara-bangsa yang tercapainya kesepakatan untuk mencakup semua kelompok tanpa perdamaian yang adil dan campur tangan dogma agama.

menyeluruh, mencabut undang- Setelah adanya perjanjian Juba undang yang membatasi kebebasan ini, Nasredeem Abdulbari menteri atau yang mendiskriminasi warga kehakiman Sudan mengumumkan negara, memberlakukan reformasi berakhirnya pemerintahan Islam di hukum. Selain itu, telah dibentuk draf Sudan. Langkah-langkah ini piagam konstitusi baru yang akan merupakan bagian dari upaya untuk menjamin hak-hak perempuan dan merubah tradisi syariah di Sudan, yang pemuda, memajukan kesejahteraan telah menjadi dasar hukum di Sudan sosial dengan menyediakan layanan selama beberapa decade. Peraturan dan kesehatan, pendidikan, perumahan, undang-undang yang diskriminatif dan jaminan sosial (IDEA, 2019). juga mulai diubah. Seperti pada akhir

Pada bulan Oktober tahun 2020, 2019 dihapusnya Undang-Undang tidak lama setelah pemerintah transisi Ketertiban Umum yang terkenal kejam. beroperasi, juga telah disepakati Pasal 152 Undang-Undang tersebut Perjanjian Perdamaian Juba, perjanjian memasukkan hukuman 40 kali ini menjamin untuk terciptanya cambukan bagi perempuan yang identitas negara yang inklusif untuk mengenakan celana panjang di depan semua kelompok tanpa memandang umum (Ahmed, 2020).

Terkait dengan perubahan pemerintahan lainnya (BTI pemerintahan negara Sudan kearah Transformation Index, 2022). yang lebih demokratis ini terdapat Bagi sebagian publik Sudan, beberapa survei terkait pandangan pemerintahan Islamis telah kehilangan masyarakat. Data survei dari legitimasi dan daya tarik politik. Barometer Arab sebuah jaringan Kegagalan Islam politik di Sudan penelitian non partisan yang merupakan cerminan dari masalah memberikan wawasan tentang lembaga negara yang lemah dan pandangan warga di seluruh dunia organisasi politik yang tidak efektif di Arab, menunjukkan bahwa Sebagian negara tersebut, sebagian karena besar warga Sudan menganggap warisan pemerintahan otoriter yang bahwa konsep syariah mewakili panjang. Kemudian dua partai utama pemerintahan yang baik. Namun, sudan *National Unionist Party* (NUP) masyarakat Sudan yang berusia muda dan *Democratic Unionist Party* (DUP) secara signifikan lebih cenderung sebagian besar bersifat sektarian, tidak mendukung peran agama yang memiliki koherensi ideologis dan terbatas. Mereka yang berusia 18-29 struktur internal yang kuat. Ini cenderung tidak mempercayai berkontribusi pada sifat rapuh politik pemimpin agama daripada orang Sudan dan menciptakan peluang bagi Sudan yang berusia 50 tahun ke atas, militer untuk turun tangan (Daoud, dan percaya bahwa pemimpin agama 2022).

cenderung korup (Robbins & Rubin, Setelah mengalami berbagai 2020). kemajuan, ternyata kinerja

Sedangkan data dari pemerintahan transisi masih terkendala Afrobarometer, yang dikumpulkan oleh berbagai hal termasuk dominasi pada bulan Juli dan Agustus 2018, militer, dan krisis ekonomi. memberikan gambaran dimana Kekhawatiran akan kudeta oleh militer masyarakat Sudan sangat mendukung kembali terjadi pada akhir 2021, demokrasi dan supremasi hukum, pimpinan militer yaitu Letnan Jenderal sebanyak 62% lebih menyukai Abdel Fattah al-Burhan, telah demokrasi daripada bentuk membubarkan pemerintah transisi

dalam kudeta dan melakukan Dukungan Keluarga Sudan kekerasan terhadap masyarakat yang (Kamabreesi, 2022)

melakukan protes dan menyuarakan Kerugian finansial ini telah terkait pro-demokrasi. mempengaruhi kinerja APBN 2022 dan

Pihak militer diyakini Sudan menghadapi krisis ekonomi melakukan kudeta karena beberapa makro. Untuk mengatasi hilangnya hal, pertama pengambilalihan kursi pendapatan, pemerintah menaikkan Dewan Kedaulatan oleh pihak sipil, biaya mulai dari pajak bisnis menimbulkan ancaman langsung bagi perusahaan hingga bea cukai dan biaya bisnis tokoh penting militer, yaitu al-perawatan kesehatan. Bahkan harga Burhan dan Hemedti. Kedua, roti telah meningkat lebih dari sepuluh meningkatnya pengawasan sipil yang kali lipat, sementara bahan pokok mengancam untuk mengakhiri lainnya mengalami kenaikan harga impunitas de facto para jenderal atau sebesar 200 hingga 300 persen. Harga pemimpin militer (Hoffmann, 2021). bensin dan solar melonjak lebih dari

Isu kudeta oleh pihak militer ini 135 persen (Kamabreesi, 2022). Dalam tentunya memiliki dampak buruk pada hal ini kita dapat melihat, bahwa biaya keadaan ekonomi Sudan. Selain untuk mencapai standar hidup dasar di Amerika Serikat, banyak pihak Sudan telah meroket dan membuat pendonor segera menghentikan masyarakat Sudan rentan mengalami pendanaan dan pencairan dana yang kerawanan pangan.

sudah dialokasikan. Sudan kehilangan

sekitar \$4,6 miliar bantuan luar negeri.

Ini termasuk hampir \$2,6 miliar dari

Bank Dunia yang dimaksudkan untuk proyek-proyek di bidang pertanian, irigasi, energi dan kesehatan serta sekitar \$580 juta yang dialokasikan oleh donor asing untuk Program

Perkembangan Transisi Demokrasi Sudan

Menurut Jean-Jacques Rousseau, demokrasi merupakan cara paling penting bagi manusia untuk mencapai kebebasan atau otonomi. Rousseau menyatakan bahwa warga negara akan 'bebas' ketika mereka

berpartisipasi secara langsung dan terjadi revolusi, Sudan masih terus menerus dalam membentuk menggunakan konstitusi tahun 2005 kehidupan komunitas mereka dimana mengizinkan presiden untuk (Heywood, 2004). menjabat tidak lebih dari dua masa

Untuk melihat demokrasi suatu jabatan atau lima tahun. Namun, negara lebih jauh lagi, kita menurut Freedom House Pada bulan memerlukan indeks dengan cakupan Desember 2018, amandemen konstitusi global yang diperbarui secara berkala. berusaha diperkenalkan di parlemen Oleh karena itu, penulis akan untuk menghapus batasan masa mengandalkan indeks Freedom jabatan, yang akan membuka jalan bagi House yang sudah terpercaya untuk al-Bashir untuk mencalonkan diri mengetahui perkembangan transisi kembali pada tahun 2020.

demokrasi di negara Sudan. Untuk Sedangkan pada tahun 2022, mengukur keberhasilan demokrasi, pemilu masih dalam tahap tentunya sebuah negara tentunya perencanaan. Pada September 2021, harus berhasil dalam mewujudkan Kementerian Kehakiman telah nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai mempresentasikan dan mengadakan demokrasi ini belum bisa tercipta konsultasi publik tentang rancangan sepenuhnya di negara Sudan karena undang-undang komisi pemilu. pemerintah yang berkuasa tidak Namun, rancangan undang-undang memperhatikan hak politik serta tersebut tidak disahkan, dan komisi kebebasan sipil. pemilihan tidak dibentuk sebelum

Berikut penulis tampilkan kudeta Oktober 2021. laporan dari Freedom House yang Kemudian terkait transparansi telah penulis rangkum, terkait hak kinerja pemerintah kepada publik. politik dan kebebasan sipil pada tahun Pada tahun 2018, pemerintah Presiden 2018 sebelum terjadinya revolusi dan Al-Bashir terus mendominasi pada tahun 2022, 3 tahun setelah pemerintahan. Menurut Freedom revolusi. House, pemerintah beroperasi dengan

Pertama terkait variabel Hak cara yang tidak bertanggung jawab. Politik. Pada tahun 2018 sebelum Institusi keamanan menerima 78

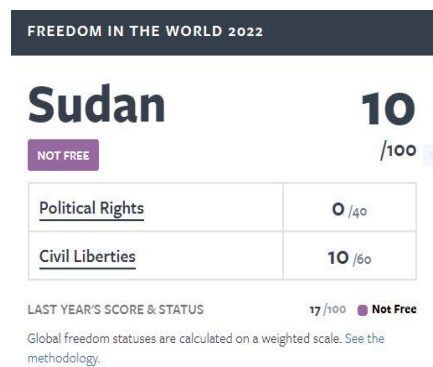
persen dari APBN, tidak transparan ditutup. Para jurnalis ditekan untuk dan korup. Sedangkan pada tahun 2022 tidak melakukan pelaporan kritis.

pihak militer masih terus Perihal Kebebasan beragama mendominasi. Konstitusi sementara pada tahun 2018, walaupun dijamin di mewajibkan anggota TSC dan TLC, bawah konstitusi sementara tahun 2005 kabinet, dan gubernur untuk kebebasan beragama ini tidak dihormati mengajukan pengungkapan tentang dalam praktiknya. Sejak kemerdekaan aset pribadi mereka, tetapi tidak ada Sudan Selatan pada tahun 2011, mekanisme yang jelas untuk komunitas minoritas Kristen di Sudan penegakannya. menghadapi penganiayaan dan

Kedua terkait variable beberapa gereja ditutup. Kemudian kebebasan sipil. Pada tahun 2018 pada tahun 2022 terdapat beragam media di Sudan menghadapi perkembangan dimana TSC berjanji banyak kendala karena pembatasan untuk mengeluarkan pedoman yang pemerintah, penyensoran, dan jelas bagi mereka yang meminta izin pelecehan terhadap jurnalis. Pada untuk membangun gereja baru. Pada tahun 2022, Kementerian Kebudayaan tahun 2020, pemerintah transisi telah dan Informasi telah menerbitkan draf mengadopsi Undang-Undang undang-undang reformasi media Amandemen, yang diantaranya untuk konsultasi publik (House, 2022). terdapat ketentuan menghapus Rancangan undang-undang ini hukuman fisik untuk penodaan agama, membahas pembentukan komisi untuk dan mengizinkan non-Muslim untuk mendukung dan melindungi hak atas berdagang dan mengonsumsi alcohol. informasi, independensi jurnalis dan Selanjutnya kebebasan organisasi media, pembentukan Dewan berpendapat oleh akademisi, pada Pers untuk melindungi kebebasan pers. tahun 2018 banyak terdapat Namun saat terjadi kudeta kembali penangkapan terhadap pelajar yang pada Oktober 2021, masih terjadi mengkritik pemerintahan. Pemerintah penangkapan terhadap beberapa memandang mahasiswa sebagai jurnalis, stasiun penyiaran berita radio sumber oposisi dan dengan keras

menyerang sebuah pertemuan di menuju arah demokrasi ini belum asrama yang berafiliasi dengan sebuah berhasil tercapai.

universitas. Pada tahun 2022 hal ini masih tetap terjadi, menyusul kudeta Oktober 2021, pihak berwenang menangkap dekan dan profesor di Universitas al-Gezira yang mengkritik pengambilalihan militer. Pada bulan November 2022, beberapa universitas menutup kampus mereka karena ketidakstabilan politik.



Gambar 1. Sudan Global Freedom Status

Sumber Gambar: Freedom House

Dengan melihat dari beberapa aspek yang mendukung *political rights*, dan *civil liberties* secara keseluruhan pada tahun 2022, Freedom House melaporkan skor kebebasan untuk negara Sudan mencapai nilai 10/100, dan dengan skor ini Sudan dikategorikan sebagai negara tidak bebas. Kemudian dapat terbilang transisi

Menurut Dankwart Rustow terdapat 3 tahapan atau fase dalam transisi menuju Demokrasi (Sørensen, 2008). Fase pertama adalah fase persiapan (*Prepatory Phase*), Fase kedua adalah fase keputusan (*Decision Phase*), fase terakhir adalah fase konsolidasi, fase ini merupakan proses di mana demokrasi mulai dikembangkan, institusi dan praktik demokrasi mulai tertanam dalam sistem politik., serta terdapat dukungan besar terhadap praktik demokrasi.

Setelah berakhirnya pemerintahan Omar Bashir dan pemerintahan Islam, Sudan memang mengalami beberapa fase demokratisasi, yaitu terjadinya fase transisi pemerintahan setelah berakhirnya rezim otoriter ke arah yang lebih demokratis. Selanjutnya Sudan juga sempat memasuki fase instalasi, nilai-nilai demokrasi mulai dimasukkan atau diadopsi ke dalam berbagai aspek kehidupan negara Sudan. Misalnya seperti pengesahan undang-undang yang merupakan langkah penting menuju reformasi

serta dibentuk lembaga-lembaga adalah untuk memulai kesadaran negara yang menopang nilai-nilai pemilihan melalui berbagai cara, dan demokrasi. menyediakan logistik, persyaratan dan

Penghapusan undang-undang bahan pemilihan (Cerdán, 2021).
yang diskriminatif juga menjadi awal Setelah mengalami beberapa dari proses demokratisasi ini. fase demokratisasi ini, sangat Konstitusi sementara mewajibkan disayangkan demokrasi Sudan dapat Sudan pada sistem politik dikatakan belum berhasil terdesentralisasi di mana warga negara terkonsolidasi. Hal ini karena bebas untuk menggunakan hak politik pemerintah transisi dikuasai atau mereka tanpa diskriminasi berdasarkan didominasi oleh Warga negara tidak ras, agama, jenis kelamin, afiliasi mendapatkan hak mereka secara regional, atau alasan lain semacam itu. penuh dan pihak militer membatasi Perjanjian Juba pada Oktober 2020 juga masyarakat untuk berpendapat dengan menjadi tanda bahwa negara Sudan melakukan kekerasan dan ancaman. telah mengalami transisi ke arah yang Pemerintahan transisi juga dianggap lebih demokratis, dimana perjanjian ini tidak menjalankan aktivitas mencakup pasal-pasal yang menjamin pemerintahan dengan transparan, penghormatan terhadap pluralisme seperti proses pemilihan jabatan yang agama, dan budaya di Sudan. kosong dan transparansi anggaran

Mekanisme mengenai pemilu pemerintahan. Pemilu yang juga mulai dirancang pada mencerminkan adanya kebebasan sipil September 2021. Dewan Kedaulatan dan politik juga belum terlaksana Sudan mulai mengumumkan hingga sekarang.

dimulainya prosedur praktis untuk Dominasi pihak militer disini pemilihan yang bertujuan untuk merupakan hambatan utama untuk mengkonsolidasikan transisi terciptanya transisi ke arah demokrasi. demokrasi negara. Dewan Kedaulatan Demokrasi tidak dapat terwujud, juga telah mengumumkan bahwa apabila militer terus terlibat dalam tujuan dari prosedur pemilihan ini politik karena pasti otoritarianisme

akan terjadi. Selain itu, ada beberapa nilai atau karakteristik dari militer yang bertentangan dengan nilai demokrasi, karena memiliki karakter keras dalam menyelesaikan masalah, maka hal ini berbahaya karena akan merusak demokrasi dan proses demokratisasi. Keadaan ekonomi Sudan yang masih memburuk dan juga mempengaruhi proses demokratisasi ini, karena konsolidasi demokrasi tidak hanya proses politik tetapi juga menuntut perubahan sosial dan ekonomi.

Beberapa upaya harus tetap dilakukan untuk mendukung proses transisi demokrasi di Sudan, seperti proses mediasi, dan konsultasi dengan pembuatan kebijakan internasional. Beberapa aktor internasional seperti Uni Afrika, US, dan aktor lainnya harus secara aktif mengecam kudeta yang terjadi dan memberikan sanksi apabila tidak ada tindakan positif dari militer. Untuk mengakhiri kudeta krisis kemanusiaan di Sudan aktor internasional sebaiknya juga mengintensifkan bantuan kemanusiaan untuk meringankan kesulitan ekonomi penduduk Sudan dan mendorong transisi demokrasi.

SIMPULAN

Setelah berakhirnya Pemerintahan Presiden Omar Bashir, pemerintah transisi Sudan mulai mengakhiri pemerintahan militer Islam yang sebelumnya didasarkan pada Islamisme, supremasi Arab dan penerapan kekuatan militer yang kejam. Pemerintah gabungan sipil-militer dibentuk untuk memimpin transisi ke demokrasi.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa setelah tiga tahun berakhirnya pemerintahan diktator Omar Bashir, negara Sudan masih tergolong sebagai negara yang tidak bebas. Menurut *Freedom in the World* pada tahun 2022 kebebasan di Sudan mencapai nilai 10/100.

Setelah berakhirnya pemerintahan Omar Bashir dan pemerintahan Islam, Sudan memang mengalami beberapa fase demokratisasi, seperti terjadinya transisi setelah berakhirnya rezim otoriter ke arah yang lebih demokratis. Selanjutnya Sudan juga sempat memasuki fase instalasi, nilai-nilai demokrasi mulai dimasukkan atau

diadopsi ke dalam berbagai aspek kehidupan negara Sudan, seperti persiapan pemilu, pembentukan konstitusi baru, dan perubahan undang-undang yang lebih adil. Namun setelah mengalami beberapa fase demokratisasi ini, demokrasi Sudan dapat dikatakan belum berhasil terkonsolidasi. Hal ini karena pemerintah transisi dikuasai atau didominasi oleh militer. Warga negara tidak mendapatkan hak mereka secara penuh dan pihak militer membatasi masyarakat untuk berpendapat dengan melakukan kekerasan dan ancaman. Keadaan ekonomi Sudan yang masih memburuk juga mempengaruhi proses demokratisasi ini.

UCAPAN TERIMA KASIH [Font Book Antiqua, Size: 12, bold]

Berisi ucapan terimakasih kepada lembaga pemberi dana, dan atau individu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip. Sifatnya tentatif. [Font: Book Antiqua, size: 12, normal]

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, K. (2020). *Thank you, our glorious revolution': activists react as*

Sudan ditches Islamist laws. The Guardian.

<https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/16/thank-you-our-glorious-revolution-activists-react-as-sudan-ditches-islamist-laws>

Amin, M. (2020). *Sudan Drops Islamic Social Laws in Historic Move Sparking Joy and Fury*. Middle East Eye.

<https://www.middleeasteye.net/news/sudan-islamic-laws-alcohol-apostasy-dropped-reactions>

Arab, T. N. (2019). *Sudan Overturns Flogging Sentence, Jail Term for Women Who Protested Against Bashir Title*. The New Arab. [sudanoverturms-flogging-sentence-for-women-protesters](https://www.thenewarab.com/sudanoverturms-flogging-sentence-for-women-protesters)

BTI Transformation Index. (2022). *Sudan Country Report 2022*. <https://bti-project.org/en/reports/country-report/SDN#pos13>

Cerdán, M. (2021). *Sudan's Sovereignty Council has Initiated Election Procedures*. Atalayar. <https://www.atalayar.com/en/ar>

- ticulo/politics/sudans-sovereignty-council-has-initiated-election-procedures/20211228135441154401.html
- House, F. (2022). *Freedom in The World: Sudan*. Freedom House. <https://freedomhouse.org/country/sudan/freedom-world/2022#PR>
- Daoud, D. (2022). *The Rise and Fall of Sudanese Islamists*. The Maydan. <https://themaydan.com/2022/02/the-rise-and-fall-of-sudanese-islamists/>
- House, F. (2023). *Freedom in The World Research Methodology*. Freedom House. <https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-research-methodology>
- Diamond, L. (1997). *Is the Third Wave of Democratization Over?* (No. 236; Issue March). <https://kellogg.nd.edu/documents/1531>
- IDEA. (2019). *Draft Constitutional Charter for the 2019 Transitional Period*. [https://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-08/Sudan Constitutional Declaration %28English%29.pdf](https://constitutionnet.org/sites/default/files/2019-08/Sudan%20Constitutional%20Declaration%20English%29.pdf)
- Grewal, S. (2021). *How Democracy Can Win Out in Sudan*. Journal Of Democracy. <https://www.journalofdemocracy.org/how-democracy-can-win-out-in-sudan/>
- Izzurahman, M. H., & Basyar, M. H. (2022). Oligarki dan Tertundanya PEMILU 2022 Di Sudan Pasca Lengsernya Presiden Bashir. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v19i1.1133>
- Heywood, A. (2004). *Political Theory: An Introduction* (Third). Palgrave Macmillan. <https://mgdc-chararisharief.com/elearn/Political Theory-1stSem.pdf>
- Kamabreesi, F. (2022). *To Save its Economy, Sudan Needs Civilian Rule*. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/opinions/2022/10/25/to-save-its->
- Hoffmann, A. (2021). Military Coup Betrays Sudan ' s Revolution: Scenarios to Regain The Path Towards Full Civilian Rule. In *Clingendael* (Issue November).

- economy-sudan-needs-civilian-rule
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (3rd ed.). PT Gramedia.
- Kurniawan, A. A., & Zahidi, M. S. (2022). Implementation of the Democratization of Sudan, The Case of the Collapse of Omar Bashir's Regime. *Jurnal ICMES*, 6(1), 1-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v6i1.112>
- Machmudi, Y. (2021). *Timur Tengah dalam Sorotan (Dinamika Timur Tengah dalam Perspektif Indonesia)* (M. R. Rumra (ed.); I). Bumi Aksara.
- Robbins, M., & Rubin, L. (2020). *Sudan's government seems to be shifting away from Islamic law. Not everyone supports these moves.* The Washington Post. <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/08/27/sudans-government-seems-be-shifting-away-sharia-law-not-everyone-supports-these-moves/>
- Sørensen, G. (2008). *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World* (Third). Westview Press Published. <https://mgdc-chararisharief.com/elearn/Political Theory-1stSem.pdf>
- Wahiduddin, W. (2020). Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Omar Bashir. *Nady Al-Adab Jurnal Bahasa Arab*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jna.v17i1.10086>
- Yuhana, A. (2019). *100 Killed in Sudan and Dozens of Bodies Are Pulled From Nile, Opposition.* The Newyork Times. <https://www.nytimes.com/2019/06/04/world/africa/sudan-war-facts-history.html#:~:text=to the Violence%3F-,100 Killed in Sudan and Dozens of,Pulled From Nile%2C Opposition Says&text=Two days after a violent,killed and hundreds more injured>
- Zaluchu, S. E. (2021). Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 3(2), 249-266. <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/93/88>

